

ANGIN KENCANG TERJANG BUKIT WOLIO INDAH, ATAP RUMAH DUA LANTAI WARGA TERLEPAS

— BPBD KOTA BAUBAU PASTIKAN TIDAK ADA KORBAN JIWA



**ANGIN KENCANG
TERJANG BWI
KAMIS, 16/7/2026 SIANG**

**ATAP RUMAH
2 LANTAI TERLEPAS
JALAN GATOT SUBROTO
RT 002 RW 002**

**KERUGIAN MATERIAL
DIPERKIRAKAN
RP 2,5 JUTA**

**TIDAK ADA
KORBAN JIWA
MAUPUN LUKA-LUKA**

**BPBD & TRC
LANGSUNG TURUN
LAKUKAN ASESMEN
DAN PENDATAAN**

**BPBD
KOTA BAUBAU
SIGAP & TANGGAP**

WASPADA CUACA EKSTREM!

- ✓ PERKUAT ATAP RUMAH
- ✓ PANGKAS DAHAN RAPUH
- ✓ HINDARI LOKASI BERISIKO
- ✓ LAPORKAN KEJADIAN
KE BPBD ATAU APARAT SETEMPAT

LAPOR CEPAT, TANGGAP HEBAT! | **0822-8888-1122
BPBD KOTA BAUBAU**

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP- Angin kencang menerjang kawasan Kelurahan Bukit Wolio Indah (BWI), Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Kamis (16/7/2026) siang. Peristiwa tersebut menyebabkan bagian rangka dan atap lantai dua rumah warga mengalami kerusakan, namun tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka.

Rumah yang terdampak berada di Jalan Gatot Subroto RT 002 RW 002 milik Muhammad Amri La Sari dan La Isi. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kerusakan terjadi pada

struktur penyangga serta penutup atap dengan nilai kerugian material diperkirakan mencapai Rp2,5 juta.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau melalui Tim

Reaksi Cepat (TRC) langsung melakukan peninjauan setelah menerima laporan masyarakat. Petugas melakukan asesmen lapangan, pendataan kerusakan, serta dokumentasi sebagai dasar

penyusunan laporan dan koordinasi penanganan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau, Dr. Mohamad Tasdik, M.Si., mengatakan kondisi penghuni rumah dalam keadaan selamat. Menurutnya, respons cepat dilakukan untuk memastikan dampak bencana dapat segera ditangani.

“Begitu laporan warga masuk, tim kami langsung turun ke lokasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kerusakan hanya terjadi pada rangka dan atap rumah dengan perkiraan kerugian sekitar Rp2,5 juta,” ujar Tasdik.

Ia menjelaskan, hasil pendataan lapangan akan menjadi

Lanjut ke Hal: 7

PMI Busel Perkuat Stok Darah, 49 Kantong Terkumpul dalam Aksi HUT ke-12 Buton Selatan

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Buton Selatan menggelar aksi donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan kemanusiaan yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Lakarada, Rabu (15/7/2026), tersebut menargetkan pengumpulan 100 kantong darah untuk mendukung kebutuhan transfusi masyarakat.

Sekretaris PMI Kabupaten Buton Selatan Sumarti yang mewakili



li Ketua PMI Busel Hj. Sitti Norma Adios mengatakan, kegiatan donor darah menjadi salah satu langkah strategis PMI dalam menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat. Aksi tersebut mer-

upakan kegiatan donor darah kedua yang dilaksanakan PMI Busel sepanjang 2026 setelah sebelumnya digelar pada 18 April 2026.

“Kegiatan ini adalah donor darah kedua

yang kami laksanakan tahun ini. Semoga stok darah selalu tersedia sehingga kebutuhan masyarakat Buton Selatan dapat terpenuhi setiap saat,” ujar

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Alvin Akawijaya Resmikan Jembatan Sungai Loko Penopang Ekonomi Warga di Lawele



Laporan: La Harman

BUTON, BP-Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, SH meresmikan Jembatan Perintis Garuda Sungai Loko di Dusun Lawunta, Desa Lawele, Kecamatan Lasalimu, sebagai upaya memperkuat koneksi

antarwilayah sekaligus mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat. Jembatan yang merupakan bagian dari Program Ekspedisi 1000 Jembatan Gantung untuk Indonesia itu dibangun melalui kolaborasi Pe-

Lanjut ke Hal: 7

Pasar Murah Buton Selatan Sediakan 600 Sak Beras SPHP Jelang HUT ke 12

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP -Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali memperkuat upaya menjaga stabilitas harga pangan dengan menggelar pasar murah menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Dalam kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Lakarada, Rabu



(15/7/2026), pemerintah menyediakan 600 sak beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) besar-

Lanjut ke Hal: 7

Bapas Baubau Edukasi Siswa SMAN 2 Baubau Bahaya Bullying dan Penyalahgunaan Medsos



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Baubau mengintensifkan upaya pencegahan perundungan (bullying) dan penyalahgunaan

media sosial melalui kegiatan edukasi kepada siswa kelas X SMA Negeri 2 Baubau dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 2026, Selasa (15/7/2026).

Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran hukum sekaligus menanamkan budaya saling menghormati sejak awal peserta di-

Lanjut ke Hal: 7

Angin Kencang Terjang Bukit Wolio Indah, Atap Rumah Dua Lantai Warga Terlepas, BPBD Kota Baubau Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

koordinasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah terkait untuk menentukan langkah lanjutan bagi warga terdampak.

“Data dan dokumentasi sudah kami himpun. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan pihak terkait agar penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan,” katanya.

BPBD Kota Baubau mengingatkan masyarakat agar mening-

katkan kewaspadaan terhadap ancaman cuaca ekstrem, terutama angin kencang yang dapat muncul secara tiba-tiba. Warga diminta memperkuat konstruksi atap rumah, membersihkan dahan pohon yang rapuh, serta menghindari lokasi berisiko saat kondisi angin meningkat.

Fenomena angin kencang yang menyebabkan kerusakan bangunan merupakan salah satu ancaman

hidrometeorologi yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dalam catatan sejarah kebencanaan nasional, Indonesia menghadapi peningkatan kejadian cuaca ekstrem dalam beberapa dekade terakhir akibat perubahan pola iklim. Secara global, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) juga mencatat bahwa badai dan angin ekstrem menjadi salah satu dampak perubahan iklim yang mening-

katkan risiko terhadap permukiman dan infrastruktur.

BPBD Kota Baubau memastikan kesiapsiagaan personel tetap berjalan untuk menghadapi kemungkinan kejadian serupa. Masyarakat yang mengalami atau mengetahui kejadian bencana diminta segera melapor kepada BPBD maupun aparat kelurahan agar proses penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. (*)

merintah Kabupaten Buton dan TNI guna mempermudah akses menuju kawasan pertanian dan perkebunan.

Peresmian tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buton, anggota DPRD Kabupaten Buton, Camat Lasalimu, Komandan Koramil 1413-10 Lasalimu, Kepala Desa Lawele, Babinsa, serta tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan masyarakat mencerminkan kuatnya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Komandan Kodim 1413/Buton Letkol Inf Yoni, S.Hub.Int., mengatakan pembangunan jembatan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses bagi masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan konektivitas. Menurutnya, infrastruktur tersebut akan mempercepat distribusi hasil perkebunan sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

“Jembatan ini dibangun untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya dalam mengangkut hasil perkebunan dan meningkatkan perekonomian warga. Kami berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga dan merawat jembatan ini agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang,” ujar Letkol Inf Yoni.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Garuda Sungai Loko menjadi bukti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menghadirkan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

“Walaupun kondisi keuangan daerah sedang menghadapi berbagai tantangan, dengan semangat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Buton dan TNI, pembangunan jembatan ini dapat terwujud,” kata Alvin. Menurut Alvin, keberadaan jem-

batan tersebut tidak hanya memperpendek waktu tempuh masyarakat menuju kawasan perkebunan, tetapi juga diharapkan meningkatkan kelancaran distribusi hasil pertanian, menekan biaya transportasi, serta membuka peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di Desa Lawele dan wilayah sekitarnya.

“Saya berharap masyarakat memanfaatkan sekaligus menjaga fasilitas ini dengan baik agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Dusun Lawunta menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Pemerintah Kabupaten Buton, dan TNI atas terealisasinya pembangunan Jembatan Garuda Sungai Loko. Menurut mereka, jembatan tersebut telah lama dinantikan karena menjadi jalur penghubung utama menuju lahan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan warga.

“Jembatan ini sangat membantu masyarakat sebagai akses menuju kawasan perkebunan sekaligus meningkatkan aktivitas perekonomian warga,” ungkap perwakilan tokoh masyarakat.

Secara historis, pembangunan jembatan gantung telah menjadi salah satu strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi keterisolasian wilayah pedesaan, terutama sejak berbagai program percepatan pembangunan kawasan tertinggal digencarkan pada dekade 2010-an. Di tingkat internasional, Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) juga menempatkan pembangunan infrastruktur konektivitas sebagai instrumen utama untuk mengurangi kesenjangan wilayah, meningkatkan akses layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Kehadiran Jembatan Garuda Sungai Loko di Kabupaten Buton menjadi bagian dari semangat pembangunan tersebut, yakni menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. (*)

Bapas Baubau Edukasi Siswa SMAN 2 Baubau Bahaya Bullying dan Penyalahgunaan Medsos

dik memasuki lingkungan sekolah.

Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak Bapas Baubau, Sitti Andriyanti, A.Md.I.P., S.H., M.H., bersama tim menjelaskan bahwa edukasi tersebut merupakan langkah preventif untuk membekali peserta didik dengan pemahaman mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, konsekuensi hukum atas tindakan di ruang digital, serta pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan.

“Kegiatan ini merupakan langkah preventif dalam menyuksekkan MPLS 2026 melalui pemberian pemahaman hukum terkait penggunaan media sosial dan pencegahan aksi bullying,” ujar Sitti Andriyanti.

Dalam sesi materi, Pembimbing Kemas-yarakatan Bapas Baubau, Jamaludin, S.Pd., M.H., menguraikan bahwa perundungan

tidak hanya terjadi di secara langsung di lingkungan sekolah, tetapi juga berkembang di ruang digital seiring meningkatnya penggunaan media sosial oleh kalangan remaja.

“Bullying dapat terjadi di mana saja, baik di dunia nyata maupun di dunia digital, dan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia. Penyebabnya bersifat kompleks, mulai dari faktor individu, keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah hingga media,” kata Jamaludin.

Selain menjelaskan faktor penyebab perundungan, tim Bapas Baubau juga memaparkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bullying, dampak penyalahgunaan media sosial, serta pentingnya sinergi antara sekolah, orang tua, dan peserta didik dalam melakukan pencegahan maupun penanganan apabila terjadi kasus perundun-

gan.

“Siswa diharapkan berani melaporkan tindakan bullying kepada pihak yang berwenang sehingga persoalan dapat ditangani sejak dini dan tidak berkembang menjadi tindak pidana maupun kekerasan yang berulang,” tegas tim Bapas Baubau.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah praktis mencegah bullying, antara lain mengenali penyebab perundungan, membangun komunikasi yang sehat, menghargai perbedaan, menggunakan media sosial secara bijaksana, serta menghindari penyebaran konten yang dapat merugikan orang lain.

Secara historis, isu pencegahan bullying semakin menjadi perhatian dunia setelah UNESCO dalam berbagai laporan global menegaskan bahwa perundungan berdampak langsung terhadap kes-

ehatan mental, prestasi belajar, hingga meningkatnya risiko putus sekolah. Di Indonesia, pemerintah terus memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak serta penerapan kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan yang mendorong sekolah menjadi ruang belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Melalui edukasi yang digelar pada masa MPLS tersebut, Bapas Baubau berharap para siswa memiliki pemahaman hukum yang lebih baik, mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta menjadi pelopor dalam menciptakan budaya sekolah yang menghargai sesama, menjunjung etika digital, dan menolak segala bentuk perundungan sebagai bagian dari pembentukan karakter generasi muda. (*)

PMI Busel Perkuat Stok Darah, 49 Kantong Terkumpul dalam Aksi HUT ke-12 Buton Selatan

Sumarti.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PMI Busel berhasil mengumpulkan 49 kantong darah dari target awal sebanyak 100 kantong. Meskipun belum mencapai target, PMI menilai partisipasi masyarakat cukup tinggi karena banyak warga datang secara sukarela untuk mendonorkan darahnya.

Namun, tidak seluruh calon pendonor dapat mengikuti proses pengambilan darah. Sebagian peserta harus dinyatakan belum memenuhi syarat medis setelah melalui pemeriksaan kesehatan, seperti kadar hemoglobin (HB) rendah, tekanan darah tidak sesuai ketentuan, serta faktor

usia.

“Banyak masyarakat yang datang dengan sukarela untuk mendonor, tetapi ada yang tidak memenuhi syarat karena kadar HB rendah, tekanan darah tidak memenuhi ketentuan, maupun faktor usia,” jelas Sumarti.

Hingga kini, Kabupaten Buton Selatan belum memiliki fasilitas bank darah sendiri. Kondisi tersebut membuat pemenuhan kebutuhan darah masyarakat masih bergantung pada Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Baubau. PMI Busel terus membangun koordinasi dengan rumah sakit dan UDD PMI Baubau agar kebutuhan darah warga tetap dapat dilayani.

“Kalau ada mas-

yarakat Buton Selatan yang membutuhkan darah dan menghubungi kami, kami langsung berkoordinasi dengan UDD PMI Baubau. Alhamdulillah selama ini kebutuhan darah masyarakat selalu dapat dipenuhi,” katanya.

Gerakan donor darah memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari pelayanan kemanusiaan modern. Secara nasional, kegiatan donor darah berkembang sejak PMI didirikan pada 17 September 1945, tidak lama setelah Indonesia merdeka, dengan salah satu tugas utamanya membantu pelayanan kesehatan dan penanganan bencana. Sementara secara internasional, gerakan donor darah

sukarela diperkuat sejak pembentukan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada 1919, yang mendorong pelayanan kemanusiaan di berbagai negara.

Sumarti berharap kegiatan donor darah dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat Buton Selatan untuk berbagi dan membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, satu kantong darah yang disumbangkan dapat menjadi harapan hidup bagi orang lain yang sedang menjalani perawatan medis.

“Setetes darah yang kita sumbangkan sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa orang

pemerintah daerah menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia hingga ke seluruh wilayah kabupaten. Program itu juga merupakan tindak lanjut arahan Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., agar pemerintah terus hadir membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.

“Tujuan kami agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton Selatan,” ujar LM Idris.

Ia menjelaskan, komoditas yang disiapkan meliputi 600 sak beras SPHP ukuran 5 kilogram, 100 kilogram gula pasir, 120 liter minyak goreng Minyakita, 100 rak telur, serta masing-masing 50 kilogram bawang merah dan bawang putih. Khusus beras SPHP dijual seharga Rp57.000 per sak, lebih murah Rp5.000 dibandingkan harga pasar yang berkisar Rp62.000 per sak ukuran 5 kilogram.

Menurut LM Idris, tingginya minat masyarakat terlihat dari antusiasme warga yang datang memanfaatkan

pasar murah. Bahkan, pemerintah kecamatan dan desa meminta agar kuota beras SPHP ditambah karena permintaan terus meningkat. “Masyarakat berharap kegiatan pasar murah terus dilaksanakan dan kuota beras SPHP dapat diperbanyak karena kebutuhannya sangat tinggi,” katanya.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Dinas Ketahanan Pangan menjadwalkan pasar murah di Kecamatan Siompu dan Siompu Barat dengan membawa sekitar enam ton beras SPHP. Selanjutnya, kegiatan serupa akan dilaksanakan di Kecamatan Kadatua pada Senin, 20 Juli 2026. Menjelang puncak HUT ke-12 Kabupaten Buton Selatan, pemerintah daerah juga masih akan menggelar tiga kali pasar murah di sejumlah wilayah lainnya. “Kami ingin memastikan pasokan pangan tetap tersedia hingga ke kecamatan dan desa sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar LM Idris.

Program pasar murah merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam pengendalian inflasi daerah. Secara nasional, pemerintah

melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog sejak beberapa tahun terakhir terus memperluas penyaluran beras SPHP sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk menjaga keterjangkauan beras di tengah fluktuasi harga. Kebijakan ini menjadi salah satu strategi pemerintah menekan laju inflasi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Secara historis, berbagai negara juga menerapkan intervensi pasar pangan ketika terjadi gejolak harga komoditas. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat bahwa penyediaan cadangan pangan, operasi pasar, hingga subsidi bahan pokok merupakan instrumen yang lazim digunakan banyak negara untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui pasar murah sejalan dengan praktik tersebut, yakni memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang lebih terjangkau di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. (*)

Pasar Murah Buton Selatan Sediakan 600 Sak Beras SPHP Jelang HUT ke 12

lah kebutuhan pokok lainnya dengan harga di bawah pasar guna membantu masyarakat mem-

peroleh bahan pangan yang lebih terjangkau.

Kepala Dinas Ketah-

anan Pangan Kabupaten Buton Selatan, LM Idris, SP., MM.,

mengatakan pasar murah tersebut merupakan bagian dari komitmen

DPR Dorong Audit Nasional Fasilitas Amunisi TNI Usai Ledakan Madiun



Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP-Ledakan yang terjadi di Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad), Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menjadi perhatian serius DPR RI. Komisi I DPR meminta pemerintah dan TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh fasilitas penyimpanan amunisi guna memastikan standar keselamatan berjalan optimal.

Insiden yang terjadi pada Kamis (16/7) tersebut mengakibatkan satu prajurit TNI meninggal dunia dan enam personel lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan berbeda. Peristiwa itu dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengamanan fasilitas militer yang menyimpan material berisiko tinggi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan duka cita kepada keluarga korban dan institusi TNI. Ia menegaskan keselamatan prajurit serta masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pertahanan negara.

“Insiden ini menegaskan pentingnya

peningkatan tata kelola serta standar keselamatan penyimpanan amunisi. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh fasilitas TNI merupakan langkah krusial, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya konstruktif agar sistem yang ada benar-benar aman dan sesuai kebutuhan operasional,” kata Dave, Jumat (17/7).

Menurut Dave, evaluasi tidak hanya diperlukan terhadap prosedur kerja personel, tetapi juga kondisi infrastruktur, sistem pengawasan, teknologi pendukung, serta mekanisme mitigasi risiko di seluruh gudang amunisi milik TNI.

Ia juga mendorong percepatan modernisasi fasilitas penyimpanan munisi dengan mengadopsi teknologi keselamatan terbaru. Langkah tersebut dinilai penting agar sistem logistik pertahanan Indonesia semakin tangguh menghadapi perkembangan ancaman dan kebutuhan operasional militer.

“Kami percaya bahwa melalui kerja sama erat antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan lembaga terkait, bangsa Indonesia dapat membangun

sistem pengelolaan amunisi yang lebih modern dan terpercaya,” ujar Dave.

Komisi I DPR, lanjutnya, akan terus mengawal proses evaluasi agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memperbaiki sistem internal TNI, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara.

Sementara itu, TNI Angkatan Darat menyatakan penyebab pasti ledakan masih dalam proses penyelidikan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Donny Pramono mengatakan laporan awal menyebutkan kejadian berlangsung saat personel melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perawatan material munisi.

“Melaksanakan harwat, pemeliharaan dan perawatan yang memang sudah melalui prosedur-prosedur yang sudah dijalankan dan prosedur-prosedur itu sudah melalui protap-protap mulai dari briefing awal sampai pelaksanaan,” ujar Donny.

Setelah kejadian, satuan terkait langsung melakukan proses evakuasi terhadap seluruh korban ke rumah sakit untuk memperoleh penanga-

nan medis. TNI juga melaporkan insiden tersebut melalui mekanisme berjenjang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kejadian tersebut, satu personel TNI dinyatakan meninggal dunia, empat prajurit mengalami luka berat, dan dua lainnya mengalami luka ringan. Aparat TNI masih melakukan pendalaman untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya ledakan di gudang penyimpanan tersebut.

Secara historis, insiden terkait fasilitas penyimpanan amunisi bukan kali pertama terjadi dalam dunia militer. Banyak negara memperketat standar keamanan gudang munisi setelah sejumlah kecelakaan besar, seperti ledakan depot amunisi di Tianjin, China, pada 2015 yang menewaskan puluhan orang dan mendorong evaluasi besar terhadap sistem penyimpanan bahan berbahaya.

Di Indonesia, pengelolaan fasilitas militer juga terus mengalami pembaruan seiring perkembangan teknologi pertahanan. Sejumlah insiden di masa lalu menjadi bahan evaluasi bagi TNI untuk meningkatkan sistem keselamatan, termasuk penerapan prosedur standar operasional, pengamanan area, dan peningkatan kompetensi personel.

Peristiwa di Madiun kini menjadi pengingat bahwa modernisasi pertahanan tidak hanya berkaitan dengan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga meningkatkan kesiapan infrastruktur pendukung yang menjamin keselamatan prajurit dan masyarakat sekitar. (*)

Gibran Percepat Jembatan Way Bungur, Akses Pelajar Lampung Jadi Perhatian



Wapres Gibran meninjau pembangunan Jembatan Way Bungur di Lampung Timur.

LAMPUNG TIMUR, BP-Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan Jembatan Way Bungur di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dipercepat agar segera digunakan masyarakat. Peninjauan proyek tersebut dilakukan setelah kondisi warga, terutama pelajar, yang harus menyeberangi sungai menggunakan perahu klotok tanpa perlengkapan keselamatan menjadi perhatian publik.

Gibran meninjau langsung proyek jembatan yang menghubungkan Desa Tanjung Tirta dan Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, pada Rabu (15/7). Dalam kunjungan itu, Wapres bersama rombongan menaiki perahu klotok untuk melihat kondisi aliran sungai sekaligus memantau perkembangan pembangunan dari dekat.

Proyek Jembatan Way Bungur sebelumnya sempat mangkrak sejak 2016. Pemerintah kemudian kembali mendorong penyelesaiannya sebagai bagian dari pemantauan proyek strategis nasional (PSN) guna meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Lampung Timur.

Dalam peninjauan tersebut, Gibran didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Kajari Lampung Timur, Dandim 0429 Lampung Timur, dan Kapolres Lampung Timur.

Dari lokasi proyek, Gibran menerima laporan perkembangan pembangunan dari pihak Kementerian PUPR. Pemerintah menargetkan pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih di kawasan tersebut dapat selesai pada akhir Juli 2026, sementara jembatan darurat ditargetkan dapat digunakan dalam waktu dua pekan agar kendaraan roda dua dapat melintas.

“Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gibran.

Wapres juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan jembatan permanen dengan dukungan pemerintah daerah. Menurutnya, sejumlah persoalan teknis maupun nonteknis, termasuk pembebasan lahan, harus diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Segera dibangun untuk jembatan permanennya. Tapi pembangunannya membutuhkan sinergi dengan kepala daerah. Urusan teknis, nonteknis, dan pembebasan lahan, daerah harus proaktif,” katanya.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Ia menilai kehadiran Wapres menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bapak Wapres. Kehadiran beliau menjadi motivasi dan bukti nyata kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur daerah serta kesejahteraan masyarakat Lampung Timur,” ujar Ela.

Jembatan Way Bungur diharapkan menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat, termasuk memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Setelah peninjauan, Gibran melanjutkan agenda ke MTs Muhammadiyah I Way Bungur, lahan pertanian singkong di Desa Muara Jaya, serta Taman Purbakala Pugung Raharjo untuk melihat potensi pengembangan wisata sejarah dan budaya.

Secara historis, pembangunan infrastruktur penghubung antar-daerah menjadi salah satu strategi utama pemerintah Indonesia sejak era awal pembangunan nasional. Program pembangunan jalan dan jembatan pada masa Orde Baru melalui Repelita hingga berbagai proyek strategis nasional setelah reformasi menunjukkan bahwa konektivitas menjadi faktor penting dalam pemerataan ekonomi. Dalam konteks global, pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian banyak negara setelah Bank Dunia dan berbagai lembaga internasional menandatangani kesepakatan transportasi sebagai salah satu kunci pengurangan kesenjangan wilayah. (Ard)

Baleg DPR Dorong Kejelasan Status Hukum dalam RUU Masyarakat Adat

JAKARTA, BP-Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memasuki tahap perumusan dengan sorotan utama pada kejelasan nomenklatur dan kedudukan hukum masyarakat adat. Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, meminta istilah yang digunakan dalam regulasi tersebut dipastikan agar tidak menimbulkan tafsir berbeda antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat.

Benny menyampaikan pandangan itu dalam Rapat Den-

gar Pendapat Umum (RDPU) RUU Masyarakat Adat di Baleg DPR, Kamis (16/7). Ia menilai kedua istilah tersebut memiliki perbedaan mendasar, baik dari sisi konsep, definisi, maupun konsekuensi hukum yang akan muncul apabila dituangkan dalam undang-undang.

Menurut Benny, masyarakat adat merupakan konsep yang lebih luas karena berkaitan dengan identitas sosial, budaya, antropologi, serta perspektif hak asasi manusia. Sementara masyarakat hukum adat memiliki posisi yang lebih spesifik sebagai subjek hukum

yang telah mendapatkan pengakuan dalam konstitusi Indonesia.

“Konsep masyarakat adat dan masyarakat hukum adat sering kali masih dicampuradukkan. Padahal, keduanya memiliki definisi, makna, dan konsekuensi yang berbeda,” ujar Benny dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan, masyarakat hukum adat memang merupakan bagian dari masyarakat adat, tetapi tidak seluruh masyarakat adat secara otomatis dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat. Perbedaan tersebut, menurut dia, harus dite-

gaskan agar aturan yang lahir nantinya memberikan kepastian hukum.

“Pertanyaannya, apakah undang-undang ini akan mengatur masyarakat adat atau masyarakat hukum adat? Ini harus jelas sejak awal,” kata Benny.

Dalam pembahasan yang sama, anggota Baleg DPR dari Fraksi PKB, Eva Monalisa, mengingatkan agar RUU tersebut tidak bergeser menjadi instrumen yang hanya mengakomodasi kepentingan investasi. Ia meminta negara tetap menempatkan perlindungan hak masyarakat adat sebagai tujuan ut-

ma pembentukan regulasi.

Eva menyoroti masih adanya persoalan tumpang tindih izin usaha dengan wilayah adat akibat lemahnya tata kelola pada masa lalu. Menurutnya, izin yang sudah diterbitkan tidak boleh langsung memperoleh legitimasi tanpa evaluasi substantif. “Izin-izin yang terbit di atas wilayah adat akibat lemahnya tata kelola masa lalu tidak boleh otomatis memperoleh legitimasi tanpa evaluasi yang menyeluruh,” ujarnya.

Secara historis, pen-

gakuan terhadap masyarakat hukum adat telah menjadi bagian dari perjalanan hukum Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hasil amendemen menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perdebatan mengenai hak masyarakat adat juga menjadi isu global setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan United Nations

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) pada 2007 yang menegaskan perlindungan hak masyarakat adat di berbagai negara.

Pembahasan RUU Masyarakat Adat di DPR selanjutnya akan berfokus pada penyelarasan definisi, mekanisme pengakuan, serta perlindungan hak masyarakat adat agar regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, mencegah konflik agraria, dan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dengan keberadaan komunitas adat.

Sekolah Suku Bajo Jadi Prioritas, Wamendikdasmen Bergerak Cepat di Wakatobi



WAKATOBI, BP- Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza UI Haq memerintahkan percepatan revitalisasi SD Maritim Mola yang melayani anak-anak Suku Bajo di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Instruksi tersebut disampaikan secara langsung kepada Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, melalui sambungan telepon saat melakukan kunjungan kerja di Desa Mola Utara, Kamis (16/7/2026). Langkah itu diambil setelah Wamendikdasmen melihat langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah yang dinilai membutuhkan penanganan segera.

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat menjangkau masyarakat di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam agenda tersebut, Fajar didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua serta Bupati Wakatobi Haliana.

Sebelum mengunjungi kawasan permukiman Suku Bajo, rombongan lebih dahulu meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi. Sekolah tersebut telah memperoleh bantuan revitalisasi senilai Rp1,024 miliar melalui Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari pen-

ingkatan kualitas infrastruktur pendidikan.

Dalam dialog bersama para siswa, Fajar mengajak peserta didik membangun kebiasaan hidup sehat, memiliki cita-cita yang tinggi, serta mempersiapkan diri menyambut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan sekolah. Ia menilai pembangunan fisik sekolah harus diikuti peningkatan mutu pembelajaran agar investasi pemerintah menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

“Peningkatan infrastruktur sekolah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas proses belajar mengajar di kelas,” kata Fajar di hadapan para guru dan siswa.

Usai dari Wangi-Wangi, rombongan melanjutkan perjalanan menuju SD Maritim Mola dan SMP Maritim Mola di Desa Mola Utara. Kedua sekolah tersebut menjadi tempat belajar mayoritas anak-anak dari komunitas Suku Bajo yang selama ini hidup berdampingan dengan laut sebagai ruang kehidupan sekaligus sumber penghidupan.

Saat meninjau kondisi bangunan sekolah, Fajar menemukan sejumlah fasilitas yang memerlukan pembenahan. Tanpa menunggu proses administrasi yang panjang, ia langsung menghubungi Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen agar proses revitalisasi dapat dipercepat.

“Saya minta revitalisasi sekolah ini segera diproses agar anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang lebih layak,” ujar Fajar saat berbicara

melalui sambungan telepon dengan Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen.

Menurut Fajar, tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan pendidikan. Anak-anak yang tinggal di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas sebagaimana peserta didik di wilayah perkotaan.

“Letak geografis tidak boleh menjadi sekat bagi anak-anak pesisir untuk memperoleh pendidikan yang setara,” tegasnya.

Ia juga menilai pendidikan di wilayah kepulauan memerlukan pendekatan yang adaptif. Kurikulum dan proses pembelajaran, menurutnya, perlu mempertimbangkan karakter masyarakat maritim tanpa menghilangkan identitas budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Langkah cepat kementerian tersebut mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Suku Bajo sekaligus pengurus Sekolah Maritim Mola, Nurdin. Menurutnya, kunjungan Wamendikdasmen memberikan harapan baru bagi masyarakat pesisir yang selama ini menginginkan peningkatan fasilitas pendidikan.

“Kehadiran pemerintah menjadi bukti bahwa masa depan pendidikan anak-anak kami benar-benar mendapat perhatian,” ujar Nurdin.

Rangkaian kunjungan kemudian ditutup di SMA Muhammadiyah 1 Wakatobi yang sebelumnya telah memperoleh bantuan revitalisasi sebesar Rp1,5 miliar. Dalam kesempatan itu, Fajar mengingatkan bahwa Wakatobi tidak hanya harus dikenal sebagai

salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia, tetapi juga mampu melahirkan generasi muda yang unggul, berakarakter, dan memiliki daya saing global.

Secara historis, perhatian pemerintah terhadap pembangunan pendidikan di wilayah 3T telah menjadi kebijakan nasional sejak diterbitkannya berbagai program afirmasi pendidikan bagi daerah terpencil pada dekade 2010-an. Program tersebut terus diperkuat melalui peningkatan sarana pendidikan, distribusi guru, digitalisasi pembelajaran, hingga penguatan akses pendidikan yang merata sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

Dalam konteks internasional, peningkatan kualitas pendidikan di wilayah terpencil juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. Melalui SDG 4 tentang Quality Education, seluruh negara didorong memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu tanpa memandang kondisi geografis maupun latar belakang sosial.

Bagi Wakatobi yang dikenal sebagai kawasan Taman Nasional Laut sejak 1996 dan menjadi salah satu destinasi wisata bahari kelas dunia, peningkatan kualitas pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang.

Pemerintah berharap pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan seiring dengan pengembangan sektor pariwisata sehingga masyarakat lokal, termasuk komunitas Suku Bajo, mampu menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri. (*)

Pemkot Kendari Percepat Transformasi Digital, Bidik Predikat Baik PEMDI 2026

KENDARI, BP- Pemerintah Kota Kendari menargetkan predikat baik pada penilaian Pemerintahan Digital (PEMDI) tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi berbasis digital. Target tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), integrasi data, serta penyempurnaan dokumen pendukung guna menghadapi sistem evaluasi pemerintahan digital yang baru.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Digital (PEMDI) yang dipimpin Asisten III Sekretariat Daerah Kota Kendari, La Ode Abdul Manas Salihin, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Kendari, Kamis (16/7/2026). Pertemuan itu menjadi langkah awal menyatukan persepsi seluruh OPD menghadapi perubahan mekanisme evaluasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju PEMDI.

Perubahan sistem evaluasi tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2026 yang secara resmi mencabut Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang evaluasi SPBE. Pemerintah menilai pendekatan lama yang lebih menitikberatkan pada aspek administratif perlu disempurnakan agar selaras dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Berbeda dengan SPBE, penilaian PEMDI mengutamakan dampak nyata layanan digital terhadap masyarakat. Indikator keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga tingkat kepuasan pengguna, keterpaduan layanan lintas instansi, keamanan sistem digital, kualitas tata kelola, pemanfaatan data sebagai aset strategis, serta efektivitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik.

Dalam sistem baru tersebut, jumlah indikator penilaian disederhanakan menjadi 20 indikator yang terbagi dalam tujuh aspek utama, yakni kepuasan pengguna, manajemen data, keamanan digital, keterpaduan layanan, tata kelola, penyelenggaraan, dan teknologi. Aspek kepuasan pengguna memperoleh bobot terbesar, yakni 25 persen, sehingga menjadi ukuran utama keberhasilan transformasi digital pemerintah daerah.

ah.

Asisten III Setda Kota Kendari, La Ode Abdul Manas Salihin, menegaskan bahwa keberhasilan menghadapi evaluasi PEMDI tidak dapat dicapai oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh OPD. Menurutnya, kolaborasi menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan digital yang terintegrasi.

“Ini sangat penting karena akan mendukung prestasi Pemerintah Kota Kendari. Saya mengajak teman-teman saling membantu dan saling mendukung karena ini untuk kepentingan kita bersama,” ujar Abdul Manas.

Ia juga berharap Kota Kendari mampu meraih predikat baik pada pelaksanaan evaluasi perdana menggunakan instrumen PEMDI tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan ego sektoral dan mengedepankan sinergi dalam penyediaan data maupun pelayanan digital.

Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah penguatan Satu Data Indonesia dan Satu Data Kota Kendari. Seluruh OPD diminta aktif menginput serta memperbarui data pembangunan, pelayanan publik, dan potensi daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara terpadu oleh seluruh instansi melalui prinsip satu kali input untuk berbagai kebutuhan layanan pemerintahan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, mengakui transformasi menuju PEMDI masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek infrastruktur digital yang belum sepenuhnya memadai akibat keterbatasan anggaran selama pengembangan SPBE sebelumnya.

“SPBE sebenarnya belum selesai infrastrukturnya, sekarang sudah masuk lagi ke PEMDI. Karena itu kami sudah berupaya agar pada 2027 anggaran infrastruktur PEMDI sudah tersedia,” kata Sahuriyanto.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur digital akan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kualitas pelayanan pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah Kota Kendari pun telah mengusulkan agar pembangunan infrastruktur digital menjadi salah satu prioritas pada Tahun Anggaran 2027 sehingga implementasi PEMDI dapat berjalan lebih optimal.

Selain infrastruktur,

kesiapan OPD dalam menyediakan data dan bukti pendukung juga menjadi perhatian. Sahuriyanto menjelaskan bahwa setiap perangkat daerah harus memastikan seluruh dokumen tersedia secara lengkap karena proses evaluasi meliputi penilaian administrasi, wawancara, hingga visitasi lapangan oleh asesor eksternal.

“Keberhasilan implementasi PEMDI sangat bergantung pada kesiapan seluruh OPD dalam menyediakan data, dokumen pendukung, dan menghadapi seluruh tahapan evaluasi,” ujarnya.

Transformasi digital pemerintahan sendiri merupakan agenda strategis yang telah dijalankan pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah mulai mengintegrasikan layanan digital di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas birokrasi, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Hadirnya PEMDI menjadi fase lanjutan yang lebih menitikberatkan pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Secara global, transformasi digital sektor pemerintahan juga menjadi tren yang berkembang pesat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations E-Government Survey secara berkala mengukur kemajuan pemerintahan digital di berbagai negara. Penilaian tersebut tidak hanya melihat pemanfaatan teknologi, tetapi juga keterbukaan data, partisipasi masyarakat, integrasi layanan, serta kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan inklusif. Pendekatan inilah yang kini mulai diadopsi dalam sistem evaluasi pemerintahan digital di Indonesia.

Melalui implementasi PEMDI, Pemerintah Kota Kendari berharap mampu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan terintegrasi. Di sisi lain, keberhasilan penilaian tersebut diharapkan tidak sekadar meningkatkan prestasi daerah, tetapi juga menjadi tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta memperkuat daya saing Kota Kendari di tingkat nasional. (*)

TP PKK Buton Dorong Peran Ayah Lewat Webinar Peringatan Harganas 2026, akil Bupati Buton Syarifudin Saafa Ajak Perkuat Peran Ayah dalam Membangun Generasi Emas



Pewarta: La Harman

BUTON, BP- Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Buton menegaskan pentingnya kolaborasi ayah dan ibu dalam membangun keluarga berkualitas melalui webinar bertajuk "Peran Ayah dalam Pengasuhan" yang digelar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bupati Buton, Selasa (7/7/2026), itu diikuti pengurus TP PKK tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Buton secara luring maupun daring.

Ketua TP PKK Kabupaten Buton, Ny. Maimunah Moko Syarifudin Saafa, mengatakan pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Menurutnya, keberhasilan membangun keluarga harmonis tidak dapat diwujudkan apabila peran pengasuhan hanya dibebankan kepada salah satu pihak.

"Pengasuhan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab se-

rang ibu, tetapi membutuhkan kerja sama yang baik antara ayah dan ibu dalam membangun keluarga yang harmonis," ujar Ny. Maimunah.

Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2026 TP PKK Kabupaten Buton telah melaksanakan pembinaan di satu kecamatan dan satu desa binaan. Program tersebut meliputi pembinaan majelis taklim, sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, edukasi pencegahan pernikahan usia dini, serta mendorong setiap desa dan kelurahan memiliki perpustakaan melalui kerja sama dengan Dinas Perpustakaan untuk memperoleh bantuan buku.

Selain itu, TP PKK juga menggerakkan puskesmas agar mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah menjadi lahan produktif yang dapat mendukung ketahanan pangan keluarga. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting yang hingga kini masih menja-

di salah satu prioritas pembangunan nasional.

Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, ST, yang mewakili Bupati Buton sekaligus menjadi narasumber webinar, menilai keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Ia bahkan mengusulkan agar seminar serupa dilaksanakan secara berkala sehingga semakin banyak keluarga memperoleh pemahaman mengenai pola asuh yang sehat.

"Saya mengusulkan kepada ibu-ibu PKK agar seminar dan materi seperti ini rutin dilakukan," kata Syarifudin.

Menurutnya, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kolaborasi orang tua akan melahirkan keluarga yang harmonis sekaligus mencetak generasi unggul yang mampu menghadapi tantangan masa depan.

"Melalui kegiatan ini kami berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya ko-

laborasi ayah dan ibu dalam pengasuhan anak semakin meningkat sehingga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, berkualitas, dan melahirkan generasi yang unggul," ujarnya.

Secara historis, Hari Keluarga Nasional diperingati setiap 29 Juni berdasarkan penetapan Pemerintah Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat ketahanan keluarga. Di tingkat internasional, isu penguatan keluarga juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui International Day of Families yang diperingati setiap 15 Mei, sebagai bagian dari kampanye global untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, kesetaraan peran orang tua, serta pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan semangat tersebut, TP PKK Kabupaten Buton berharap seluruh elemen masyarakat terus mendukung program pembinaan keluarga agar mampu melahirkan generasi emas Indonesia. (*)

Bupati Buton Dr Azhari Tengah Kukuhkan Pengurus FKUB 2026-2030, Kerukunan Ditegaskan sebagai Fondasi Pembangunan



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menegaskan komitmennya memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis melalui pelantikan dan pengukuhan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Buton Tengah masa bakti 2026-2030. Pengukuhan yang dipimpin langsung Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, berlangsung di Aula Pancana Kantor Bupati Buton Tengah, Selasa (14/7/2026), sebagai langkah memperkuat sinergi antarumat beragama demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bupati Azhari menegaskan bahwa FKUB memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat di bidang keagamaan. Menurutnya, keharmonisan kehidupan beragama merupakan modal utama dalam menciptakan iklim pembangunan yang aman dan kondusif.

"Kita semua adalah satu keluarga. Pengurus FKUB merupakan tokoh-tokoh pilihan yang bertugas membantu pemerintah menjaga persaudaraan, keharmonisan, dan persatuan antarumat beragama di seluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah," ujar Azhari.

Ia juga meminta seluruh jajaran FKUB lebih aktif membangun komunikasi lintas agama melalui pertemuan rutin. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya mempererat hubungan antarpemuka agama



sekalius mendeteksi sejak dini berbagai potensi persoalan sosial maupun keagamaan. "Forum ini harus menjadi ruang dialog yang mampu mencegah lahirnya konflik dan memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyinggung kebutuhan sarana organisasi FKUB. Meski kebijakan efisiensi anggaran daerah belum memungkinkan pembangunan gedung sekretariat baru, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tetap berkomitmen mencari solusi terbaik agar aktivitas organisasi berjalan optimal. "Kami akan segera berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyiapkan langkah terbaik bagi keberlangsungan tugas FKUB," tegasnya.

Selain memperkuat dukungan di tingkat daerah, pemerintah juga akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Azhari, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan fisik, tetapi juga oleh terpeliharanya kerukunan sosial yang menjadi perekat kehidupan masyarakat. "Kerukunan adalah modal dasar pembangunan. Daerah yang damai akan lebih mudah berkembang dan menyejahterakan masyarakatnya," ungkapnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Muh. Adam Basan, Wakil Ketua I DPRD Mazaludin, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Abdul-

lah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah, Kepala Kantor Penyelenggaraan Haji dan Umrah, para kepala organisasi perangkat daerah, Ketua FKUB terpilih Prof. Kanan, serta jajaran pengurus FKUB yang mewakili berbagai unsur agama di Kabupaten Buton Tengah.

Secara historis, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia merupakan implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat. Regulasi tersebut menjadi landasan pembentukan FKUB di seluruh provinsi dan kabupaten/kota sebagai forum dialog yang bertugas menjaga toleransi serta mencegah potensi konflik berbasis keagamaan.

Dalam konteks global, penguatan dialog antarumat beragama juga menjadi perhatian dunia. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan World Interfaith Harmony Week yang diperingati setiap pekan pertama Februari sebagai momentum membangun saling pengertian dan kerja sama lintas agama. Semangat tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Buton Tengah memperkuat FKUB sebagai mitra strategis dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menciptakan stabilitas sosial yang menjadi fondasi utama pembangunan daerah. (*)

Bupati Buton Alvin Akawijaya Tekankan Peningkatan Pelayanan Usai Resmikan Enam Puskesmas Baru



Laporan: La Harman

BUTON, BP - Pemerintah Kabupaten Buton memperkuat sistem pelayanan kesehatan masyarakat melalui peresmian enam gedung Puskesmas baru yang disertai implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) berbasis siklus kehidupan. Pemerintah daerah menegaskan pembangunan infrastruktur kesehatan harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan agar akses kesehatan semakin merata.

Peresmian enam fasilitas kesehatan tersebut dilakukan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., dalam kegiatan Gerakan Posyandu Aktif Integrasi Layanan Primer Siklus Kehidupan di Puskesmas Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Rabu (8/7/2026). Program ini diarahkan untuk memastikan masyarakat dari berbagai kelompok usia memperoleh layanan kesehatan yang setara.

Enam Puskesmas yang resmi beroperasi yakni Puskesmas Tuangila Kecamatan Kapontori, Puskesmas Wajah Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan, Puskesmas Siotapina Kecamatan

Siotapina, Puskesmas Wolowa Kecamatan Wolowa, Puskesmas Banabungi Kecamatan Pasarwajo, dan Puskesmas Wakaokili Kecamatan Pasarwajo.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra mengatakan pembangunan fasilitas kesehatan merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan publik. Namun, keberadaan gedung baru harus diikuti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Pembangunan Puskesmas bukan hanya menghadirkan gedung baru, tetapi bagaimana fasilitas tersebut mampu memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat,” ujar Alvin.

Ia juga meminta jajaran tenaga kesehatan memperkuat edukasi mengenai pola hidup sehat serta meningkatkan upaya pencegahan melalui deteksi dini penyakit. Menurutnya, pelayanan kesehatan modern tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mengutamakan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

“Saya meminta tenaga kesehatan terus meningkatkan edukasi

si kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit,” katanya.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Muliadin Masra, SKM., M.Si., menjelaskan pembangunan kesehatan menjadi bagian penting dari arah pembangunan daerah. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memperkuat program penurunan stunting, imunisasi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan.

“Pembangunan gedung Puskesmas bukan sekadar penambahan infrastruktur, tetapi merupakan upaya nyata Pemerintah Kabupaten Buton dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan,” kata Muliadin.

Penguatan layanan primer melalui ILP sejalan dengan transformasi sistem kesehatan nasional yang mulai digulirkan Kementerian Kesehatan sejak 2021. Transformasi tersebut menempatkan layanan primer sebagai fondasi utama kesehatan masyarakat dengan pendekatan berbasis siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia.

Secara historis, penguatan layanan kesehatan primer memiliki kaitan dengan Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 yang digagas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Deklarasi tersebut menempatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai strategi utama menuju pemerataan kesehatan global. Di Indonesia, konsep tersebut terus berkembang hingga lahirnya berbagai program seperti Posyandu pada era 1980-an dan transformasi layanan primer saat ini.

Dalam kegiatan tersebut juga dibacakan komitmen bersama mendukung implementasi ILP pada Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, dan Posyandu Kabupaten Buton. Komitmen itu mencakup penguatan jejaring layanan kesehatan, peningkatan kualitas kader, optimalisasi pencatatan dan pelaporan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat Buton yang sehat, mandiri, produktif, dan sejahtera.(*)

Dinkes Buton Tengah Perkuat Posyandu untuk Tekan Risiko Penyakit



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah menggelar Gerakan Aktifkan Posyandu di Lapangan J. Wayong, Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Rabu (15/7/2026), sebagai langkah memperkuat peran Posyandu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit melalui layanan kesehatan berbasis komunitas.

Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah Hasrun Hasan, Camat Gu, Lurah Watulea, Lurah Bombonawulu, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Buton Tengah, dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas Gu, serta masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Dalam kegiatan itu, masyarakat memperoleh berbagai layanan, mulai dari pelayanan Posyandu, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kesehatan, deteksi dini faktor risiko penyakit, edukasi gizi, kampanye konsumsi buah dan sayur, hingga ajakan meningkatkan aktivitas fisik

sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah Hasrun Hasan mengatakan, Gerakan Aktifkan Posyandu tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya secara mandiri. “Posyandu harus menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat. Melalui gerakan ini kami ingin membangun budaya hidup sehat yang dimulai dari keluarga,” ujarnya.

Menurut Hasrun, edukasi yang diberikan difokuskan pada deteksi dini penyakit, penerapan pola gizi seimbang, serta pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Semakin dini masyarakat memahami faktor risiko penyakit, semakin besar peluang kita mencegah munculnya berbagai masalah kesehatan,” katanya.

Gerakan tersebut sejalan dengan transformasi layanan kesehatan primer yang terus diperkuat pemerintah Indonesia. Sejak Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dikembangkan secara nasional pada dekade 1980-an, ke-

beradaannya menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan status gizi, serta memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok daerah.

Secara internasional, pendekatan promotif dan preventif juga menjadi strategi utama yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Melalui Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 yang kemudian diperkuat dengan Deklarasi Astana pada 2018, pelayanan kesehatan primer berbasis masyarakat dinilai sebagai fondasi penting dalam mewujudkan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap Gerakan Aktifkan Posyandu semakin memperkuat fungsi Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. “Kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan Buton Tengah yang sehat, mandiri, dan produktif,” kata Hasrun.(*)

PT FAREN GRAFIKA

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kejagung Periksa Febrie Adriansyah sebagai Tersangka dalam Dugaan TPPU Asabri



Laporan: Amran

JAKARTA, BP - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan kasus PT Asabri. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (17/7), sebagai bagian dari pengembangan penyidikan yang dilimpahkan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas) Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik telah memanggil dan memeriksa Febrie berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterima dari Kortas Polri. "Penyidik Kejagung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka," ujar Anang kepada wartawan. Ia menambahkan, "Berdasarkan Sprindik Kortas Polri, pemeriksaan dilakukan untuk satu perkara terkait TPPU dari Asabri."

Selain perkara Asabri, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru sebagai tindak lanjut pen-

galihan penanganan perkara dari Kepolisian. Ketiga penyidikan tersebut mencakup dugaan korupsi dan TPPU pada PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN yang disebut mengakibatkan blackout, serta perkara PT Asabri.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Don Ritto dari unsur swasta dan Febrie Adriansyah. Don Ritto diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Sementara itu, Febrie diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dan/atau TPPU yang berkaitan dengan proses penanganan hukum terhadap oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri maupun sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Hotman Paris, membenarkan bahwa kliennya memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan sejak pagi hari oleh tim khusus Kejagung. "Klien kami sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik tim khusus sejak pagi tadi," kata Hotman. Hingga pemeriksaan berlangsung, belum ada keteran-

gan resmi mengenai materi pemeriksaan yang dialami penyidik.

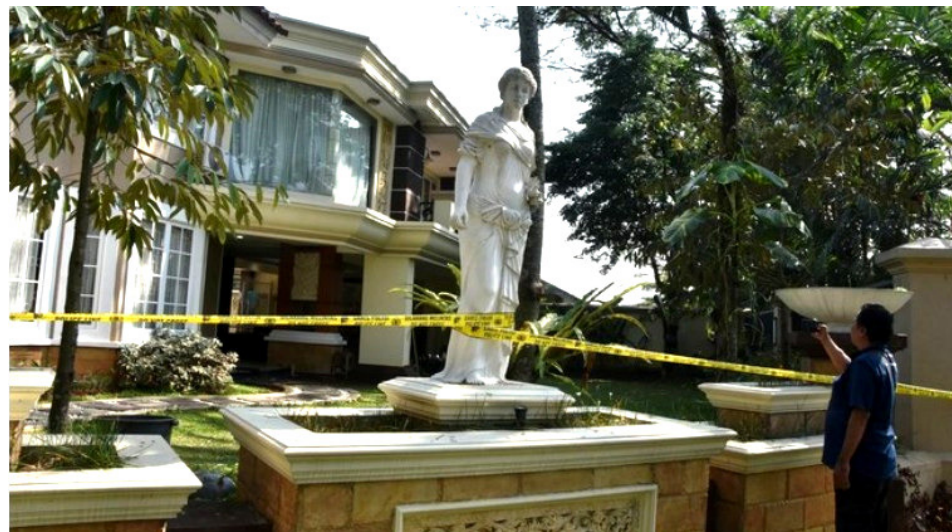
Untuk menangani perkara tersebut, Kejagung membentuk tim khusus yang beranggotakan sembilan jaksa senior. Mayoritas anggota tim diketahui pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim ini diberi mandat untuk mendalami seluruh alat bukti, menelusuri aliran dana, serta mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara menyeluruh. "Tim khusus dibentuk untuk memastikan proses penyidikan berjalan profesional dan objektif," demikian penjelasan Kejagung.

Kasus PT Asabri sendiri merupakan salah satu perkara korupsi terbesar yang pernah ditangani aparat penegak hukum di Indonesia. Perkara tersebut mencuat sejak 2020 dan berkaitan dengan dugaan penyimpanan pengelolaan investasi dana milik peserta Asabri. Dalam perkembangannya, sejumlah pejabat dan pihak swasta telah diproses hukum, sementara negara disebut mengalami kerugian yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah berdasarkan hasil audit lembaga berwenang.

Secara historis, penanganan perkara korupsi yang disertai dugaan tindak pidana pencucian uang menjadi tren penegakan hukum di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pendekatan serupa juga diterapkan di berbagai negara melalui rezim anti-money laundering (AML) untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan dan memulihkan aset negara. Mekanisme tersebut sejalan dengan praktik internasional sebagaimana diatur dalam rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) yang menjadi acuan pemberantasan pencucian uang di berbagai negara.

Penyidikan terhadap perkara ini masih terus berlangsung. Kejagung menegaskan akan mengembangkan penyidikan berdasarkan alat bukti yang diperoleh serta menelusuri keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum, menjaga akuntabilitas lembaga penegak hukum, serta memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. (*)

Polisi Pastikan Emas 74 Kilogram Sitaan dari Rumah Febrie Adriansyah Asli



Suasana rumah mewah yang dipasangi garis polisi usai penggeledahan di kawasan Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP - Kepolisian memastikan emas seberat 74 kilogram yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan emas asli. Kepastian tersebut diperoleh setelah seluruh barang bukti menjalani pengujian oleh Pegadaian, sementara uang tunai dalam berbagai mata uang juga telah melalui proses verifikasi oleh lembaga berwenang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan hasil pengujian menunjukkan emas yang diamankan penyidik tidak diragukan keasliannya. Selain itu, uang dolar Amerika Serikat dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service dan Federal Bureau of Investigation (FBI), sedangkan uang rupiah telah diverifikasi oleh Bank Indonesia. "Intinya emas itu asli dari hasil uji oleh Pegadaian," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/7).

Meski demikian, penyidik masih menunggu hasil resmi pemeriksaan terhadap uang dolar Singapura (SGD). Menurut Budi, proses verifikasi masih dilakukan oleh laboratorium atau otoritas yang berwenang. "United States Secret Service dan FBI menyatakan ada suratnya, genuine, asli. Terus rupiah dari BI juga itu asli. Tinggal surat dari laboratorium terkait untuk SGD, tetapi secara umum asli," katanya.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung kini melanjutkan penan-

ganan perkara yang menyeret Febrie Adriansyah setelah menerima pelimpahan penanganan kasus dari kepolisian. Untuk memperkuat proses hukum, Kejagung menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru yang mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa ketiga Sprindik tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dalam perkara PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara PLTU untuk PLN yang mengakibatkan blackout, serta perkara PT Asabri. "Penerbitan tiga Sprindik baru merupakan tindak lanjut atas pengalihan penanganan perkara dari kepolisian," ujar Anang.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Don Ritto dari pihak swasta dan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Don Ritto diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, sedangkan Febrie diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan/atau TPPU terkait proses penanganan perkara PT Asabri maupun sejumlah perkara dugaan korupsi lainnya. Sebelumnya, Febrie juga telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus setelah dilakukan penggeledahan oleh tim gabungan kepolisian.

Untuk menangani perkara tersebut secara independen, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus yang terdiri atas sembilan jaksa senior. Mayoritas anggota tim pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dise-

but tidak menunjukkan resistensi dalam menangani perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum itu. Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga objektivitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Secara historis, penyitaan aset hasil dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi tersebut memperkuat kewenangan aparat penegak hukum untuk melacak, membekukan, dan menyita aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Di tingkat internasional, mekanisme serupa juga diadopsi melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi itu menempatkan pelacakan dan pemulihan aset (asset recovery) sebagai salah satu pilar utama dalam pemberantasan korupsi lintas negara.

Kasus ini masih terus berkembang seiring berlanjutnya penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Penyidik tidak hanya menelusuri asal-usul seluruh barang bukti yang telah diamankan, tetapi juga mendalami dugaan aliran dana, tindak pidana pencucian uang, serta keterkaitannya dengan sejumlah perkara korupsi yang menjadi objek penyidikan. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, termasuk verifikasi seluruh mata uang asing, akan menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara di tahap selanjutnya. (*)

Selasa, 21 Juli 2026

BAUBAU POST

www.baubaupost.com

Siswa SMAN 2 Baubau Reyhan Putra Baubau Wakili Sultra di Paskibraka Nasional 2026, Walikota HYF Titip Pesan Khusus



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kota Baubau. La Ode Reyhan Putra Satria Korwa, siswa kelas XI SMAN 2 Baubau, terpilih sebagai Calon Paskibraka (Capaska) Tingkat Pusat Tahun 2026 yang akan mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 di Istana Merdeka.

Pelepasan Reyhan dilakukan Pemerintah Kota Baubau di Ruang Kerja Wali Kota Baubau, Jumat (9/7/2026). Dalam kesempatan itu, Reyhan didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Baubau Aliman, SE, serta Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Kesbangpol Baubau Ninik Gustianingsih, S.Par., M.Si.

Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Ia meminta Reyhan tidak hanya mempersiapkan kemampuan fisik selama mengikuti pelatihan, tetapi juga menjaga karakter, kedisiplinan,

dan membawa citra positif Kota Baubau sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Indonesia.

“Tampilkan yang terbaik selama bertugas sebagai Paskibraka Nasional. Jaga nama baik dan harumkan Kota Baubau di tingkat nasional. Sampaikan bahwa Baubau memiliki Benteng Terluas di Dunia dan berada pada jalur laut strategis yang menghubungkan kawasan Indonesia Barat dan Timur,” kata Yusran.

Kepala Kesbangpol Kota Baubau Aliman mengatakan, keberhasilan Reyhan menjadi Capaska Nasional merupakan kebanggaan bersama. Menurut dia, kesempatan tersebut harus dijalankan dengan kerja keras, disiplin, dan rasa tanggung jawab sebagai representasi daerah.

“Kita doakan bersama agar Reyhan mampu tampil maksimal dan mendapat kesempatan mengambil peran penting sebagai petugas upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 di Istana Merdeka,” ujar Aliman.

Reyhan akan mengikuti program Pemusatan Pembinaan dan Pelatihan

Paskibraka yang diselenggarakan Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP RI). Kegiatan tersebut berlangsung pada 14 Juli hingga 22 Agustus 2026 di PPSDM Kemendikdasmen, Ciputat, Kota Depok, sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka.

Sebelum menuju pusat pelatihan, Reyhan dijadwalkan bertolak dari Baubau menuju Kota Kendari pada Minggu (11/7/2026). Selanjutnya, ia akan mengikuti audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara pada Senin (12/7/2026), sebelum diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa (13/7/2026) bersama Tim Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia dijadwalkan kembali ke Baubau pada Sabtu (22/8/2026) setelah menyelesaikan seluruh rangkaian tugas.

Keikutsertaan Reyhan dalam Paskibraka Nasional memiliki makna historis tersendiri. Sejak pertama kali dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,

bendera Merah Putih menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia. Tradisi pengibaran bendera oleh pelajar terpilih kemudian berkembang menjadi program Paskibraka nasional yang menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda melalui nilai disiplin, nasionalisme, dan kepemimpinan.

Secara global, tradisi penghormatan terhadap simbol negara melalui upacara kenegaraan juga berkembang di berbagai negara sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Karena itu, kehadiran Reyhan sebagai wakil Sulawesi Tenggara bukan hanya membawa nama Baubau, tetapi juga menjadi bagian dari generasi muda Indonesia yang menjaga nilai kebangsaan di tingkat nasional.

Masyarakat Kota Baubau menyertai keberangkatan Reyhan dengan doa dan dukungan. Harapannya, putra daerah tersebut mampu menjalankan amanah negara dengan baik serta kembali membawa kebanggaan bagi Kota Baubau dan Sulawesi Tenggara. (*)

HUT RI ke-81, Baubau Siapkan Perayaan Meriah dan Libatkan Semua Unsur



Pewarta: Firman

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota Baubau mulai memantapkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung konsep perayaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Persiapan tersebut diawali melalui rapat perdana pembentukan panitia tingkat Kota Baubau yang dipimpin Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Selasa (14/7/2026).

Rapat tersebut menghasilkan susunan kepanitiaan yang melibatkan unsur Pemerintah Kota Baubau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, TNI-Polri, Polisi Militer, hingga perwakilan Batalyon TP 823 Wakaaka. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi strategi Pemkot Baubau untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan meriah.

Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu mengatakan, pembentukan panitia menjadi tahap awal untuk membagi tugas dan memperjelas tanggung jawab setiap unsur yang terlibat. Fokus utama kepanitiaan mencakup persiapan upacara pengibaran bendera, kegiatan masyarakat, hingga agenda Apel Besar Hari Pramuka.

“Ini adalah rapat pertama panitia per-

ayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81. Seluruh unsur telah dilibatkan, mulai dari Forkopimda, instansi vertikal, Polisi Militer, hingga perwakilan Batalyon TP 823 Wakaaka. Pembagian tugas juga sudah rampung dan jelas,” ujar Wa Ode Hamsinah.

Ia meminta seluruh seksi kepanitiaan segera melakukan rapat teknis internal untuk menyusun konsep kegiatan, mekanisme peserta, serta berbagai perlombaan yang akan melibatkan masyarakat. Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya menjadi dasar agar perayaan tahun ini dapat berlangsung lebih baik.

“Patokan kami adalah pelaksanaan tahun lalu. Apa yang masih menjadi kekurangan akan kita antisipasi bersama agar tidak terulang kembali. Perayaan tahun ini harus lebih baik dan lebih matang,” katanya.

Pemkot Baubau juga menegaskan bahwa momentum kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial pemerintahan, tetapi harus menjadi ruang kebersamaan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan nilai historis Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka setelah perjuangan panjang melawan kolonialisme.

Secara historis, peringatan kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus menjadi tr-

adisi nasional sejak Presiden Soekarno membacakan teks Proklamasi pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Momentum tersebut kemudian berkembang menjadi simbol persatuan nasional, sebagaimana berbagai negara di dunia juga memperingati hari kemerdekaan masing-masing sebagai pengingat perjalanan sejarah dan perjuangan rakyatnya.

“Kita ingin masyarakat Kota Baubau merasakan langsung kemeriahan kemerdekaan. Ini adalah perayaan bersama seluruh rakyat Indonesia, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi hal yang paling utama,” tutur Wa Ode Hamsinah.

Rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 Kota Baubau dijadwalkan dimulai 1 Agustus 2026 melalui lomba kebersihan lingkungan tingkat OPD, kecamatan, dan kelurahan, serta pemasangan umbul-umbul dan spanduk kemerdekaan. Agenda berikutnya meliputi lomba gerak jalan indah pada 10-12 Agustus, pengukuhan Paskibraka pada 15 Agustus, sidang paripurna dan renungan suci pada 16 Agustus, serta upacara penaikan dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026 di Lapangan Lembah Hijau, dilanjutkan penyerahan remisi di Lapas Kelas IIA Baubau dan ramah tamah di kawasan Lapangan Lembah Hijau serta Pantai Kamali. (*)